

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN PSAP (PP NO.24 TAHUN 2005)
ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA.**

*ANALYSIS OF APPLICATION OF ACCOUNTING UNDER THE PSAP (PP NO. 24 OF 2005) ON
PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF THE GOVERNMENT OF NORTH
SULAWESI PROVINCE.*

Oleh:

Ardy Wilther Sangian

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: ardywilther@yahoo.co.id

Abstrak : Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolah Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAP (PP No. 24 Tahun 2005) atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian ini berusaha membandingkan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang merupakan acuan penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan Pemerintah Sulawesi Utara telah berpedoman pada SAP dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, kecuali dalam pos belanja bantuan keuangan sebaiknya tidak dimasukkan di Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PSAP (PP No.24 Tahun 2005).

Kata kunci: akuntansi, laporan keuangan, realisasi anggaran

Abstract : Demands for transparency and accountability in government systems is increasing in the current era of reform, not least in the financial management of the Local Government prepared under Government Accounting Standards (SAP). Research was conducted on Pengelolah Board of Finance and Regional Property North Sulawesi Province which is located in North Sulawesi Governor's Office Complex Jl. August 17 Manado North Sulawesi. This study aims to determine the Application of Accounting Under the PSAP (PP No. 24 of 2005) for the Preparation of Financial Statements North Sulawesi Provincial Government. Metode analysis used in this research is descriptive analysis. This study sought to compare the financial statements with accounting standards is a reference implementation of the cash towards accrual-based accounting. Results showed overall North Sulawesi Government has been guided by the SAP to present the Budget Realization Report, Balance Sheet, Cash Flow Statement, and Notes to Financial Statements, except for the expenditure of financial assistance should not be included in the Budget Realization Report in accordance with the PSAP (PP No. 24 of 2005).

Keywords: accounting, financial reporting, budget realization

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntansi merupakan salah satu sarana untuk tujuan akuntabilitas. Dalam penerapan system akuntansi basis yang digunakan sangat penting. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual.

Basis kas adalah transaksi yang diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau menurunkan kas. Sebaliknya, basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Proses transisi dari basis kas menuju akrual (*cash to warl accrual*) dengan basis ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akrual.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual, yang belum mengadopsi basis akrual secara penuh. Penerapan basis akuntansi tersebut tidak melanggar undang-undang karena berada dalam jangka waktu peralihan yang ditentukan yakni pada tahun 2014. Akan tetapi, ketika periode tersebut terlewati, maka kewajiban penerapan basis akrual harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Akuntansi pada BUD Provinsi Sulawesi Utara sangat sederhana, terhadap setoran uang penerimaan pendapatan dari masing-masing SKPD BUD mendebet kas dan mengkredit rekening penysetoran pendapatan sedangkan untuk pengeluaran uang untuk pelaksanaan APBD BUD mendebet rekening belanja dan mengkredit kas. Dalam mempersiapkan penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap laporan keuangan, yang rencananya diterapkan di tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun laporan keuangannya dengan menggunakan basis kas menuju akrual.

Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PSAP (PP No. 24 Tahun 2005).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Hongren, Harrison Jr, Bamber (2009:6), Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat pengambil keputusan. Antoni (2009:51), Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran menurut cara-cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang dikit-dikitnya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan artinya.

Basis Akrual

Mohammadi (2012) melakukan penelitian dengan judul "Penerapan basis akrual penuh di organisasi pemerintah (Studi Kasus: Shiraz University of Technology, Iran)". Tujuan penelitian ini menjelaskan isu-isu teoritis dan mengumpulkan data dasar perpustakaan dan deskriptif untuk memperoleh, sistem akuntansi akrual dan memiliki kekuatan lebih untuk menilai hasil efektivitas, kinerja organisasi, dan manajemen agar dapat mengelola organisasi biaya yang lebih baik.

Akuntansi Keuangan Daerah

Darise (2008:26), apabila dikaji dari entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga non-profit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik, karenanya akuntansi keuangan daerah termasuk kedalam akuntansi sektor publik. Akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislative dan masyarakat. Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut ;

1. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

PP. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat, adalah Presiden Republik. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang duwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas dalam satu periode. Dalam konteks daerah, laporan ini ditujukan bagi pengguna laporan di luar pemerintah daerah untuk menilai dan mengambil keputusan. Di sini, sumber informasi adalah pemerintah daerah bersangkutan. Laporan keuangan harus tersaji secara wajar, transparan, mudah dipahami dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun pemerintah daerah lain. Laporan keuangan harus mengungkapkannya secara transparan sehingga mampu menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tanjung (2012:12) menyatakan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber

-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Penelitian Terdahulu

Ariana, Suharyono dan Devianti (2012) Analisis Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dan anggaran sebagai alat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kutai Timur dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja dapat dikatakan cukup efektif hal ini terlihat dalam rasio efektifitas pendapatan asli daerah yang menunjukkan bahwa pada tahun 2010 pemerintah dapat melakukan efektifitas sebesar 95%, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 97%. Dalam analisis varians juga dapat terlihat bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam menggunakan anggaran pendapatan daerah pada tahun 2010 sebesar 95,56% dan meningkat menjadi 109,53% hal ini jika dilihat dari tahun sebelumnya maka pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas dan kinerjanya dalam menggunakan anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Kuncoro (2009:145-146) penelitian ada dua jenis data yang digunakan, yaitu sebagai berikut;

1. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk numerik atau angka-angka.
2. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka yaitu berupa gambaran umum dari objek penelitian.

Data kualitatif yang digunakan dalam penerapan adalah mengenai sejarah Provinsi Sulawesi Utara sebagai tempat diadakannya penelitian. Sedangkan data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan laporan keuangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara T.A 2012.

Kuncoro (2009:146) Sumber data yang digunakan dalam penelitian pada umumnya ada dua, yaitu sebagai berikut;

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yakni berhubungan dengan laporan keuangan yang dimiliki, dan data sekunder yaitu diperoleh dari literatur-literatur dimana data-data tersebut berhubungan dengan penelitian yaitu, tentang penerapan standar akuntansi pemerintah khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dimana yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu PSAP (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan cara sebagai berikut;

1. Interview, pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Sub Monitoring Keuangan Bidang Akuntansi Badan Pengelolah Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai data yang berhubungan dengan penelitian.
2. Kepustakaan, dengan membaca literatur-literatur yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan. Serta memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas baik berupa buku-buku, Peraturan-Peraturan Pemerintah yang terkait serta dari situs internet yang relevan dan memiliki hubungan dengan pembahasan.
3. Pengambilan Data, pengambilan data yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil data pada objek yang diteliti dalam hal ini pada Badan Pengelolah Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif yaitu dengan membandingkan penyusunan laporan keuangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP (PP No. 24 Tahun 2005) yang berlaku di Indonesia sebagai acuan penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 menetapkan basis kas untuk akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran; serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Hal ini merupakan respon pemerintah atas amanat undang-undang mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan. Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari rancangan dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003. Oleh karena itu, perubahan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari basis kas menuju basis akrual dilakukan secara bertahap.

PP Nomor 24 Tahun 2005 mengatur, SAP sudah harus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2005. Artinya bahwa penyajian laporan keuangan tahun 2005 sudah harus sesuai dengan SAP. SAP mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan melaporkannya. Oleh karena itu SAP mengatur penyajian pos-pos yang harus disajikan dalam laporan keuangan seperti pos kas, piutang, aset tetap dan seterusnya. SAP yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut PSAP. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- a. Masyarakat;
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah.

Meskipun memiliki akses terhadap data informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dan pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi berupa alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan.

Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus atau defisit
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto; dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pemungutan pajak dan retribusi dilakukan oleh bendahara penerimaan. Menurut ketentuan hasil penerimaan langsung disetor oleh bendahara penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah. dikaitkan dengan pengakuan pendapatan berdasarkan basis kas maka pendapatan baru diakui setelah penyeteroran oleh bendahara penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Karena penyeteroran bendahara penerimaan ke kas umum daerah dilakukan secara terus-menerus selama pelaksanaan anggaran maka untuk memudahkan pencatatan sebaiknya hasil penerimaan pajak dan retribusi oleh bendahara langsung diakui sebagai pendapatan. Pada akhir tahun terhadap penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dikoreksi. Contoh ; selama tahun 2011 bendahara pada Dinas Pendapatan menerima retribusi sebesar Rp.6.591.421.500,00. Dari jumlah tersebut sampai akhir tahun yang belum disetor ke rekening Kas Umum Daerah Rp.1.421.500,00. Atas transaksi tersebut di jurnal :

- a. Jurnal penerimaan

Kas di Bendahara penerimaan	Rp.6.591.421.500,00
Pendapatan Retribusi	Rp.6.591.421.500,00
- b. Jurnal penyeteroran ke Rekening Kas Umum Daerah

Kas BUD	Rp.6.590.000.000,00
Kas di Bendahara penerimaan	Rp.6.590.000.000,00
- c. Jurnal pendapatan yang belum disetor

Pendapatan Retribusi	Rp.1.421.500,00.
Utang Lain-lain	Rp.1.421.500,00.

Pengambilan yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang yang mengatur mengenai badan layanan umum.

PSAP Nomor 02, menetapkan bahwa Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan belanja tak terduga.

Pembahasan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubungan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Akuntansi pada BUD Provinsi Sulawesi Utara sangat sederhana, terhadap setoran uang penerimaan pendapatan dari masing-masing SKPD BUD mendebet kas dan mengkredit rekening penyetoran pendapatan sedangkan untuk pengeluaran uang untuk pelaksanaan APBD BUD mendebet rekening belanja dan mengkredit kas. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Pada pos pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Hal ini telah sesuai dengan PSAP No. 2 ayat 22, 23 dan 24 Tahun 2005. Sistem akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi modern yang banyak diterapkan di negara maju. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun. Terbitnya PP 71 tahun 2010 merupakan implementasi Undang-Undang tersebut, walaupun untuk penerapannya dapat dilakukan secara bertahap. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.

Manfaat bagi pemerintah, antara lain untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan, antara lain apabila laporan keuangan disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan SDM yang andal di bidang akuntansi, oleh karena itu profesi akuntansi diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam penyediaan dan pengembangan SDM akuntansi di sektor pemerintahan. Akhirnya, agar pelaksanaan akuntansi basis akrual diperlukan beberapa persyaratan antara lain : (1) Sistem Akuntansi dan IT Based System termasuk sistem pengendalian intern yang andal (2) Komitmen Pimpinan, dan (3) SDM yang memada.

Ariana, Suharyono dan Devianti (2012) Analisis Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dan anggaran sebagai alat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kutai Timur dalam menggunakan anggaran

pendapatan dan belanja dapat dikatakan cukup efektif hal ini terlihat dalam rasio efektifitas pendapatan asli daerah yang menunjukkan bahwa pada tahun 2010 pemerintah dapat melakukan efektifitas sebesar 95%, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 97%. Dalam analisis varians juga dapat terlihat bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam menggunakan anggaran pendapatan daerah pada tahun 2010 sebesar 95,56% dan meningkat menjadi 109,53% hal ini jika dilihat dari tahun sebelumnya maka pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas dan kinerjanya dalam menggunakan anggaran. Dengan demikian Pemerintah Kutai Timur dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja dapat dikatakan produktif dan efektif, karena semakin kecil persentasi yang diperoleh, maka semakin meningkat pula produktifitas, efektifitas dan ekonomis belanja daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah :

1. Pada penyajian belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial, telah sesuai dengan PSAP No. 2 ayat 36 tahun 2005, sedangkan belanja bantuan keuangan tidak termasuk belanja operasi maka hal ini tidak sesuai dengan PSAP No. 2 ayat 36 tahun 2005 melainkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan yang merupakan standar akuntansi pada masa transisi dari kas menuju basis akrual penuh. Artinya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca pada tahun 2011.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk T.A 2011 telah menyusun laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dengan mencantumkan perbandingan dengan tahun sebelumnya yang merupakan komponen-komponen laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005.

Saran

Saran yang disampaikan, yaitu:

1. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Dalam hal ini perubahan atas penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual penuh.
2. Keseragaman penyusunan laporan keuangan dari seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Utara juga menentukan keberhasilan penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.
4. Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.
5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertekad untuk menerapkan Basis Akrual atas penyusunan laporan keuangan pada T.A 2014 mendatang. Untuk itu Pemerintah harus terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, Muhamad Syaf'I. 2009. *Akuntansi suatu pengantar*, Gema Insane press : Jakarta
- Ariana, Hermawati, Suharyono dan Devianti, Dwi Risma. 2012. *Analisis Pendapatan dan Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ekonomi Universitas Mulawarman. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=117143&val=4591> diakses pada tanggal 01 februari 2016 pada Hal. 1
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. PT. Indeks. Jakarta.
- Hongren, Charles., Harison, Walter T., Bamber, Linda S. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 6 Jilid 1. Diterjemahkan oleh Muhammad, Berlian. PT. Indeks. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga : Jakarta X
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (2009), *Laporan Tahunan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, (2009) Naskah Akademis, Penerapan Anggaran dan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. <https://milamashuri.wordpress.com/seminar-akuntansi/penerapan-akuntansi-pemerintah-berbasis-akrua/> diakses pada tanggal 01 februari 2016 pada Hal. 1
- Mohamahhadi M., and Sahar Zare. 2012. *Pelaksanaan Penuh Dasar Akrua di Organisasi Pemerintah (Case Study: Shiraz University of Technology, Iran)* Interdisipliner *Jurnal Penelitian Kontemporer Bisnis*: Vol. 4 (2): 287-296. <http://journal-archieves19.webs.com/287-298.pdf> diakses pada tanggal 01 februari 2016 pada Hal. 1
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Tanjung, Abdul Hafis. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*. Penerbit: Alfabeta, Bandung.